

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Mardiasmo (2002) akibat terjadinya krisis perekonomian dan kepercayaan terhadap pemerintah yang dirasakan pada bangsa Indonesia mengakibatkan terbukanya jalan yang kemudian memicu terjadinya reformasi total pada semua aspek kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan mengenai Pemerintah Daerah yaitu pada daerah atau kota atau kabupaten yang melakukan pengembangan otonomi dengan memegang prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan masyarakat yang turut serta dengan melihat apa saja keanekaragaman dan potensi yang ada pada daerah tersebut. Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah yang menciptakan suatu pola baru dalam pengelolaan anggaran dan keuangan daerah. Pola baru tersebut berisikan tuntutan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan anggaran dan keuangan, pemerintah daerah harus bertujuan pada kepentingan publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ialah salah satu alat kebijakan yang digunakan oleh pemerintah daerah. Fungsi APBD dijelaskan dalam

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat 4 tentang keuangan negara, APBD mempunyai fungsi otorisasi, fungsi pengawasan, fungsi perencanaan, fungsi stabilisasi, fungsi distribusi, dan fungsi alokasi.

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 yang menjelaskan tugas dan tanggung jawab pemimpin yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Pemerintah diminta untuk lebih serius lagi dalam memberikan pelayanan kepada publik guna terciptanya tata kelola yang lebih efektif dan efisien. Dari transparansi dan akuntabilitas dapat menghasilkan tata kelola yang baik. Akuntabilitas akan mendorong pelaku pemerintahan untuk bertanggungjawab atas apa yang dikerjakannya dan melaporkannya kepada publik.

Akuntabilitas diartikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban, maksudnya dalam melakukan suatu proses penganggaran yang mencakup persiapan, pengerjaan, dan penerapan harus tepat dan sesuai yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Dalam bukunya, Mardiasmo (2002) mengatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menagih

pertanggungjawaban terkait rencana maupun pelaksanaan anggaran, jadi masyarakat tak hanya memiliki hak untuk mengetahui pelaksanaan anggaran tersebut saja.

Oleh sebab itu, akuntabilitas publik memiliki peranan penting untuk menaikkan kinerja manajerial alasannya adalah dengan adanya akuntabilitas, masyarakat dapat melihat bagaimana anggaran yang sudah direncanakan tersebut dijalankan dan karena sebab itu pemerintah daerah otomatis akan berupaya lebih baik lagi untuk menjalankan kegiatan yang sudah direncanakan tersebut dengan tanggung jawab karena akan diawasi dan dinilai oleh masyarakat. Jadi akuntabilitas tidak hanya membuat masyarakat sebatas mengetahui anggaran tersebut saja.

Selain akuntabilitas, pemerintah daerah juga memerlukan sistem pengendalian internal yang digunakan untuk menggapai tujuan organisasinya. Sistem pengendalian internal adalah suatu sistem pengendalian yang dilaksanakan secara menyeluruh dan terus menerus pada lingkungan pemerintah yang dilakukan baik oleh pimpinan maupun pegawai untuk memberikan keyakinan yang sesuai berdasarkan terwujudnya tujuan organisasi. Tujuannya adalah guna menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang baik dengan menggunakan tata kelola sehingga dapat mengatur, mengawasi, dan mengontrol kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk urusan pemerintahan.

Demi terselenggaranya kinerja manajerial yang baik yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, laporan pertanggungjawaban, dan pembinaan harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, dan

efisien. Kinerja manajerial juga didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Kinerja pegawai sangat mempengaruhi kinerja suatu organisasi, atau artinya bagaimana kinerja pegawai itu dapat memberikan partisipasi pada kinerja organisasi (Gibson, dkk 1997). Pegawai yang memiliki motivasi kerja pasti akan memberikan yang terbaik untuk organisasi tempat ia bekerja.

Sebagai salah satu organisasi sektor publik, pemerintah daerah didesak untuk mempunyai kinerja yang mengarah pada kepentingan publik salah satunya dengan cara menciptakan pelayanan publik yang bertanggungjawab dan transparan. Dalam sektor publik, kinerja berisikan kinerja manajerial ataupun kinerja aparat. Menurut Bastian (2009) definisi dari kinerja adalah hasil dari pencapaian perwujudan suatu kegiatan dalam rangka untuk menggapai sasaran, tujuan, visi, dan misi dari suatu organisasi.

Menurut Mahoney, dkk (1963) kinerja manajerial adalah kinerja yang dilakukan oleh para individu sebagai bagian dari organisasi dalam melaksanakan tugas atau aktivitas manajerial seperti persiapan, pengkoordinasian, evaluasi, dan pengawasan. Sedarmayanti (2004) mengatakan bahwa kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah adalah hasil pencapaian dari sasaran atau tujuan yang dijelaskan dalam visi, misi, dan rencana yang digunakan pemerintah daerah untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan atau program selaras dari tugas dan fungsi pemerintah daerah.

COVID-19 adalah jenis virus baru dari SARS-CoV-2 yang telah menyebar hampir ke enam puluh lima negara (Yuliana, 2020). Adanya Keputusan Presiden

No. 12 Tahun 2020 bahwa COVID-19 adalah bencana nasional non alam yang mana berdampak pada semua aspek kehidupan salah satunya adalah organisasi. COVID-19 berdampak pada segala aspek kehidupan baik pada kesehatan, sosial, dan perekonomian.

Gap research pada penelitian-penelitian sebelumnya adalah adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial. Salah satu contohnya, penelitian yang dilakukan oleh Arum (2016), yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2017) yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Terdapat kesenjangan atau perbedaan pada hasil penelitian-penelitian terdahulu yang membuat penulis ingin melakukan pengujian terhadap penelitian ini.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan ditambahkan variabel-variabel independen yang sekiranya dapat menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial. Variabel partisipasi anggaran dipilih karena dengan adanya partisipasi dari para pegawai akan meningkatkan kinerja manajerial. Variabel akuntabilitas dipilih dikarenakan pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakannya. Variabel sistem pengendalian internal dipilih dikarenakan dibutuhkan pengendalian agar dapat meningkatkan kinerja manajerial. Sedangkan variabel motivasi kerja dipilih dikarenakan para pegawai atau sumber

daya manusianya juga mempunyai peranan yang penting untuk mendukung kinerja manajerial.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 tidak hanya memberikan dampak pada bidang kesehatan dan ekonomi, tapi juga pada sosial dan budaya. Permasalahan sosial banyak muncul dalam aspek pemerintahan. Pemerintah dituntut untuk mengambil kebijakan dengan cepat dan tepat dalam masa pandemi ini. Pemerintah perlu terus mengawal dan mencermati kebijakan dalam penanganan COVID-19 dan menyesuaikan kebijakannya terhadap tantangan baru. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh bagaimana kinerja dalam saat pandemi COVID-19 ini. Sleman dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan dalam 3 tahun terakhir yaitu 2018-2019 mendapat predikat nilai A dalam hasil evaluasi SAKIP. Maka sebab itu, peneliti ingin menguji bagaimana Pemerintah Kabupaten Sleman mempertahankan prestasi kinerjanya.

Maka sebab itu, peneliti ingin menguji apakah terdapat pengaruh kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman saat pandemi COVID-19 ini. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik **“Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Manajerial Saat Pandemi COVID-19 (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman)”**.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan adanya inkonsistensi yang terjadi pada beberapa penelitian sebelumnya, maka peneliti ingin menguji bagaimana hasilnya nanti. Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial saat pandemi COVID-19?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial saat pandemi COVID-19?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial saat pandemi COVID-19?
4. Apakah motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial saat pandemi COVID-19?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh antara partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas, sistem pengendalian internal, dan motivasi kerja terhadap kinerja manajerial pada saat pandemi COVID-19.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menggunakan cara menyebarkan kuesioner untuk menguji apakah ada pengaruh antara partisipasi penyusunan anggaran,

akuntabilitas, sistem pengendalian internal, dan motivasi kerja terhadap kinerja manajerial pada saat pandemi COVID-19 dengan cara statistik.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat untuk mengetahui bagaimana hasil pengujian dari partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas, sistem pengendalian internal, dan motivasi kerja terhadap kinerja manajerial pada saat pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah. Sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan ke publik.